

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan suatu negara dapat diperoleh dari hasil penjualan Sumber Daya Alam (SDA), laba dari badan usaha yang dilakukan negara serta dari sektor pajak (Kemenkeu 2019). Dari beberapa pemasukan kas negara tersebut, pendapatan dari sektor pajak merupakan sumber pemasukan terbesar sampai saat ini. Seperti yang terjadi di negara Indonesia, dikarenakan menjadi sumber pendapatan tertinggi maka pemerintah selalu memaksimalkan dan mengandalkan pajak untuk mendorong pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak sangat berperan penting demi keberlangsungan negara. Dimana dengan adanya pajak, Pemerintah dapat melaksanakan pembangunan serta fasilitas – fasilitas yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari – hari, diantaranya pembuatan fasilitas jalan dan jembatan, fasilitas – fasilitas lain berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Kontribusi yang dihasilkan dari pajak agar dapat berjalan secara adil dan rata dari sabang sampai merauke, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembagian antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai dengan aturan serta wewenang yang berlaku. Pajak Pusat adalah pajak yang di atur langsung oleh Kementerian Keuangan yang di laksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi

dan Bangunan sektor Pertambangan Perkebunan dan Pertanian (PBB-P3), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan lain-lain. Sedangkan Pajak Daerah yaitu pajak yang diatur oleh daerah-daerah nya masing masing. Pajak Daerah pun dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten, untuk pajak Provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak yang diatur atau dipungut oleh Kota/Kabupaten berupa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Parkir dan pajak – pajak lain yang diatur dalam peraturan (Ayza 2018).

Salah satu jenis Pajak Kota/Kabupaten yang sangat berpotensi besar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Meskipun pada awal mulanya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur langsung oleh pemerintah pusat dan termasuk Pajak Pusat seperti diatur pada UU No 12 Tahun 1994. Karena untuk memaksimalkan potensi dari tiap daerah sehingga pemerintah pusat mengatur ulang dan mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pemerintah Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA).

Seiring berkembangnya zaman, Pemerintah Daerah melakukan inovasi-inovasi terbaru yang dapat menunjang pendapatan asli daerah dari pajak nya. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan dan Instansi salah satunya adalah

bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau biasa disebut Bank bjb untuk setiap pembayaran yang akan dilakukan oleh para wajib pajak. Sehingga Bank bjb (Bank Jabar Banten) pun melakukan inovasi-inovasi terbaru menciptakan layanan-layanan guna membantu memaksimalkan Pemerintah Daerah mengoptimalkan pendapatannya khususnya pendapatan dari sektor pajak. Agar mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak daerahnya maka bank bjb meluncurkan salah satu produk layanannya yaitu bjb E-Tax yang dapat mempermudah dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib pajak daerah. Perkembangan Bank bjb dalam bekerja sama dengan beberapa Instansi Pemerintah Daerah dalam produk layanan yang telah mereka luncurkan yaitu bjb E-Tax tertera pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Kerjasama yang telah terbangun antara bank **bjb** dengan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Jawa Barat dan Banten serta luar Jawa Barat

NO	KANWIL	KANTOR CABANG	NAMA PEMDA	E-TAX PBB						
				PBB-P2 via Teller, ATM, EDC, bjb digi	PBB-P2 VIA ALFAMART	PBB-P2 VIA INDOMARET	PBB-P2 VIA TOKOPEDIA	PBB-P2 VIA BUKALAPAK	PBB-P2 VIA PT POS	TRAVELOKA
1	1	TAMANSARI	KOTA BANDUNG	√		√	√	OP	√	
2		CIMAH	KOTA CIMAH	√					√	
3		PALABUHANRATU	KAB SUKABUMI	√			√	√		
4		SOREANG	KAB BANDUNG	√	OP	√				
5		PADALARANG	KBB	√						
6		SUKABUMI	KOTA SUKABUMI	√	OP	√	√			
7		SUBANG	KAB SUBANG	√	√	√	√	√		
8		PURWAKARTA	KAB PURWAKARTA	√	√	√				√
9		KARAWANG	KAB KARAWANG	√	OP	√				OP
10		CIANJUR	KAB CIANJUR	√	OP	√				
12	2	DEPOK	KOTA DEPOK	√	√					
13		BEKASI	KOTA BEKASI	√		√	√			√
14		CIKARANG	KAB BEKASI	√	√	√	√			
15		CIBINONG	KAB BOGOR	√	OP	√				
16		BOGOR	KOTA BOGOR	√	√	√		√		
17		HASYIM ASHARI	PROV DKI JAKARTA	√		√				√
18		PEKANBARU	KOTA PEKANBARU	√	√	√				
19		BATAM	KOTA BATAM	√	OP	√				
20		BANJAR	KOTA BANJAR	√						
21		TASIKMALAYA	KOTA TASIKMALAYA	√	OP	√				√
22	MAJALENGA	KAB MAJALENGA	√	OP	√					
23	3	KUNINGAN	KAB KUNINGAN	√						
24		GARUT	KAB GARUT	√	OP	√				OP
25		CIREBON	KOTA CIREBON	√	OP	√				OP
26		INDRAMAYU	KAB INDRAMAYU	√	OP	√				
27		SUMBER	KAB CIREBON	√	OP	√	√			OP
28		PANGANDARAN	KAB PANGANDARAN	√						OP
29		CIAMIS	KAB CIAMIS	√						
30		SUMEDANG	KAB SUMEDANG	√	OP	√				OP
31		SINGAPARNA	KAB TASIKMALAYA	√						
33		4	PANDEGLANG	KAB PANDEGLANG	Close	Close	Close			Close
34	TANGERANG		KOTA TANGERANG	√	√	√	√	√	√	
35	RANGKASBITUNG		KAB LEBAK	√	OP	√	√			
36	CILEGON		KOTA CILEGON	√	OP	√				OP
37	TANGSEL		KOTA TANGSEL	√	OP	√	√			
38	BALARAJA		KAB TANGERANG	√	√	√	√	√	√	
39	KCK BANTEN		KAB SERANG	√	OP	√	√	√	√	
40			KOTA SERANG	√	OP	√	√	√	√	
TOTAL LIVE				37	10	19	12	7	5	1
TOTAL ON PROGRESS				0	13	5	0	0	7	

Sumber : Arsip Bank bjb Cabang Cianjur

Keterangan :

Kuning : Orang Pribadi

Biru : Orang Pribadi ataupun Kolektif

Merah : Close

bjb Digi : Mobile Banking

EDC : Electronic Data Capture

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMBAYARAN**

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENGGUNAKAN SISTEM LAYANAN bjb E-TAX”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menggunakan System Layanan bjb E-Tax?
2. Bagaimana Cara Pembuatan Kode Bayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kolektif Yang Dilakukan Oleh Desa?
3. Apa Upaya Yang Dilakukan Pihak bjb dalam Mempromosikan Sistem Layanan bjb E-Tax?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menggunakan System Layanan bjb E-Tax
2. Untuk Mengetahui Cara Pembuatan Kode Bayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kolektif Yang Dilakukan Oleh Desa
3. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Pihak bjb dalam Mempromosikan Sistem Layanan bjb E-Tax

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu dengan adanya penelitian pada saat praktek lapangan saat ini dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan seputar perpajakan khususnya tentang pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan system layanan bjb e-tax , mendapatkan pengalaman seputar dunia pekerjaan dan melatih penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan agar dapat meningkatkan jiwa kedisiplinan dan tanggung jawab yang nantinya akan sangat dibutuhkan di dunia perkerjaan.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu para pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi salah satu kewajiban sebagai warga Negara yang baik yaitu melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) khususnya menggunakan system layanan bjb e-tax agar dapat berguna bagi kebutuhan pembaca serta sebagai acuan atau bahan referensi untuk pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik yaitu untuk dijadikan bahan referensi , ilmu pengetahuan dan bahan bacaan khususnya untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pengertian Metode Deskriptif

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian teknik deskriptif. Menurut Amiruddin (2016:98)

“Penelitian Deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”

Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data secara akurat berdasarkan fakta yang berhubungan dengan laporan tugas akhir ini mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (BB-P2) Dengan Menggunakan Sistem Layanan Bjb E-Tax.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengetahui prosedur penerbitan surat ketetapan pajak yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi kepustakaan adalah pengambilan mengumpulkan informasi melalui dari buku – buku ilmiah perihal masalah yang akan diteliti baik berupa sumber tercetak ataupun elektronik.
2. Studi Lapangan adalah metode yang digunakan oleh penulis dengan cara pengamatan lapangan terhadap kegiatan yang dilakukan, yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan berhadapan.

b. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti dan biasanya untuk mendapatkan informasi secara nyata. Tujuan observasi ini untuk memahami dan mendalami masalah – masalah yang terjadi dalam kehidupan social.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di bjb Kantor Cabang Cianjur yang beralamat di Jalan Hos.Cokroaminoto No.56A Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis dalam memperoleh data dan bahan yang dibutuhkan untuk Penelitian Laporan Tugas Akhir yang disusun ini. penulis membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) minggu, dimulai pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. Jadwal penelitian tertera di Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	■	■	■	■																
2	Pengumpulan data LTA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Pengajuan Judul		■																		
4	Penyusunan LTA					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Bimbingan									■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Sidang																			■	

